



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOCH. JUSUF**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **243100**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.390.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1244 m2/288 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, LAINNYA Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 3068 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, WARISAN Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 2960 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, WARISAN Rp. 95.000.000
8. Tanah Seluas 2890 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, WARISAN Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **155.550.000**

1. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000



2. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.	
4.750.000	
3. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.	
7.500.000	
4. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.	
9.500.000	
5. MOBIL, TOYOTA RODA 4 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.	
130.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. ----
D. SURAT BERHARGA	Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 36.330.273
F. HARTA LAINNYA	Rp. 65.000.000
Sub Total	Rp. 2.646.880.273
III. HUTANG	Rp. 235.136.520
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 2.411.743.753

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.